

Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)

Rama Datul Ilham¹, Desi Handayani², Anda Dwiharyadi³

¹Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, ramadatulilham51@gmail.com

²Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, ci_e@yahoo.com

³Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, anda.dwiharyadi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:

Tax Avoidance,
 Kepemilikan Institusional,
 Dewan Komisaris,
 Komite Audit,
 Kualitas Audit,
Corporate Social Responsibility

Received : 23 November 2021

Accepted : 25 November 2021

Published : 1 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya isu negatif yang beredar di perusahaan pertambangan di Indonesia, salah satunya laporan indikasi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, dan *corporate social responsibility*. Untuk mengukur tingkat *tax avoidance* perusahaan digunakan proksi Cash effective tax rate (CETR). Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 15 perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 - 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report dan sustainability report. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan dewan komisaris, kualitas audit, *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pendahuluan

Di Indonesia, perusahaan yang bergerak disektor pertambangan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sektor ini pada 2019 lalu diterpa isu negatif diantaranya munculnya film dokumenter *Sexy Killer*, laporan indikasi penghindaran pajak dari Global Witness, pencabutan aturan *domestic market obligation*, dan berbagai isu lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sebagai sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya adalah penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun (Novriansa, 2019). Laporan indikasi penghindaran pajak dari Global Witness yang melibatkan salah satu perusahaan tambang multinasional yang dicurigai melakukan rekayasa harga transfer untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di dalam negeri. Selain itu, masalah lingkungan dan kemanusiaan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan seperti yang diperlihatkan pada film dokumenter *Sexy Killer*. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan krisis kesehatan bagi masyarakat disekitar lokasi tambang apabila bekas tambang tidak diurus dengan baik. Untuk itu, sektor ini perlu memperhatikan implementasi CSR dalam pelaksanaan operasional mereka. Berbagai masalah dan isu yang menerpa sektor pertambangan ini membuat peneliti tergerak untuk menjadikannya sebagai objek yang akan diteliti.

Landasan Teori

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat atau patuh terhadap perintah. Kepatuhan merupakan suatu ketaatan dengan mengikuti standar dan hukum yang berlaku dan dibuat oleh lembaga/pihak berwenang dalam bidang tertentu (Resmi, 2017).

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang memberi wewenang (pemilik/prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (manajer). teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Adanya pemisahan antara pemilik dengan pihak yang menjalankan manajemen perusahaan menimbulkan kemungkinan manajer melakukan tindakan diinginkannya namun tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Hal inilah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan diantara kedua belah pihak (Annisa, 2012).

Teori legitimasi merupakan teori yang didasari oleh fenomena kontak sosial antara organisasi(perusahaan) dengan masyarakat, dimana tujuan dari organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Berdasarkan teori legitimasi ini, perusahaan akan berusaha melakukan berbagai tindakan untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat membangun keyakinan

masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi dengan baik dan telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Maharani, 2014).

Tax avoidance merupakan upaya dari penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan teknik dan metode yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penghindaran pajak biasanya sengaja dilakukan oleh pembayar pajak agar memperkecil besarnya pajak yang akan dibayarkan (Pohan, 2011).

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham. Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik akan meningkatkan dan menunjang aktivitas operasional perusahaan. Selain itu adanya mekanisme pelaksanaan *corporate governance* yang baik dapat menjadi perhatian utama perusahaan karena akan berkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan pemegang saham. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam corporate governance adalah transparency, akuntabilitas, responsibility, independency, fairness. Untuk mencapai tata kelola yang baik dalam perusahaan, prinsip-prinsip diatas harus dilaksanakan dan dicapai oleh perusahaan dengan kerja sama di antara semua pihak (Silvia, 2014).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan peran perusahaan dalam membangun perekonomian negara dengan ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan dan masyarakat. Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memaksimalkan profit, namun juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat, seperti yang menjadi prinsip dasar dari CSR yakni *profit, people* dan *planet*. CSR tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan melainkan untuk semua sektor baik pemerintah maupun privat, karena semua organisasi dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2017 – 2020. Penelitian ini menggunakan data panel empat tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 sampai 2020, karena dari laporan keuangan tersebut menggambarkan profil dan data keuangan perusahaan yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel independen (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Corporate Social Responsibility) terhadap variabel dependen (Tax Avoidance/Penghindaran Pajak).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Jumlah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 47 perusahaan, dan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel selama periode penelitian 2017 – 2020 adalah sebanyak 15 perusahaan. Dari 15 perusahaan tersebut adalah perusahaan pertambangan yang menjadi leader market di sektor pertambangan dengan kinerja keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan di dalam laporan keuangan selama periode penelitian ini 15 perusahaan tersebut memperoleh laba, serta ada beberapa perusahaan yang masuk dalam indeks saham LQ45 yang diterbitkan oleh BEI.

Berdasarkan penjelasan diatas maka total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di penelitian ini, berikut adalah kriteria sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI selama periode 2017 – 2020	47
2.	Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan yang <i>delisting</i> dari BEI selama periode 2017 – 2020	0
3.	Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan yang mencatat kerugian	
	Periode 2017	(7)
	Periode 2018	(2)
	Periode 2019	(4)
	Periode 2020	(5)
4.	Perusahaan memiliki persentase komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah dewan komisaris.	(5)
5.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan secara lengkap	(5)
6.	Perusahaan yang baru terdaftar di BEI	
	Tahun 2018	(1)
	Tahun 2019	(3)
7.	Jumlah sampel perusahaan	15
8.	Total observasi selama periode penelitian (15 x 4)	60

Sumber: Data sekunder yang diolah 2021

Hasil dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui jumlah objek yang diteliti (N) pada tahun 2017 - 2020 diperoleh sebanyak 60 data observasi yang berasal dari perkalian antara periode penelitian (empat tahun dari 2017 - 2020) dengan jumlah perusahaan sampel sebanyak 15 perusahaan yang terdaftar di BEI.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
CETR	60	0,0593	0,8465	0,4221	0,2144
INST	60	0,1154	0,9739	0,6319	0,2423
KO	60	0,3000	0,6667	0,3901	0,0803
KOA	60	3	6	3,23	0,593
KA	60	0	1	0,60	0,494
CSR	60	0,1868	0,7363	0,3222	0,1490
Valid N (Listwise)	60				

Sumber: Output SPSS versi 20

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1) Variabel Dependen

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat rata-rata dari Variabel Dependen *Tax Avoidance/* Penghindaran pajak yang dilambangkan dengan CETR adalah 0,4221 dengan nilai minimum sebesar 0,0593 dan nilai maksimum sebesar 0,8465. Nilai minimum pada CETR ini berasal dari perusahaan PT Harum Energy Tbk (HRUM) sedangkan nilai maksimumnya berasal dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Nilai standar deviasi dari CETR adalah 0,2144. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI memiliki nilai penghindaran pajak sebesar 0,2144 atau sebesar 21%. Diasumsikan bahwa Semakin rendah nilai CETR yang dihasilkan maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Dalam pelaksanaannya, *tax avoidance* akan menimbulkan dilema etika karena perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* tersebut akan meningkatkan profitabilitas perusahaan namun akan mengurangi dukungan terhadap pemerintah dalam pembangunan negara.

2) Variabel Independen

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Besarnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan agresif perpajakan perusahaan. Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat rata-rata dari variabel independen Kepemilikan Institusional yang dilambangkan dengan INST adalah 0,6319 dengan nilai minimum sebesar 0,1154 dan nilai maksimum sebesar 0,9739. Nilai minimum pada INST berasal dari perusahaan PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) dikarenakan pada tahun 2020 perusahaan tersebut memiliki nilai Kepemilikan Institusional sebesar 0,1154 hal ini dapat disimpulkan bahwa 12% perusahaan tersebut dimiliki oleh institusi. Sedangkan nilai maksimumnya pada INST berasal dari perusahaan PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 perusahaan tersebut memiliki nilai Kepemilikan Institusional sebesar 0,9739. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 97% perusahaan tersebut dimiliki oleh institusi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata saham yang diterbitkan perusahaan pertambangan dalam penelitian ini adalah 63% saham yang dimiliki oleh institusi, sedangkan sisanya dimiliki oleh kepemilikan publik.

b. Dewan Komisaris

Untuk mendukung perusahaan perlu melaksanakan *good corporate governance*, maka diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen yang membantu tugas dewan komisaris. Dari tabel 2 di atas dapat dilihat rata-rata dari variabel independen Dewan Komisaris yang dilambangkan dengan KO adalah 0,3901 dengan nilai minimum sebesar 0,3000 dan nilai maksimum sebesar 0,6667. Nilai minimum pada KO berasal dari perusahaan PT Baramulti Suksesarana Tbk (BSSR) dikarenakan pada tahun 2019 perusahaan tersebut memiliki komisaris independen sebanyak 3 orang, dibandingkan dengan total semua dewan komisaris yang berjumlah 10 orang, maka nilai KO perusahaan tersebut pada tahun 2019 sebesar 0,3000. Sedangkan nilai maksimumnya pada KO berasal dari perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) dikarenakan pada tahun 2019 perusahaan tersebut memiliki komisaris independen sebanyak 2 orang, dibandingkan dengan total semua dewan komisaris yang berjumlah 3 orang, maka nilai KO perusahaan tersebut pada tahun 2019 sebesar 0,6667. Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa rata-rata dewan komisaris independen perusahaan pertambangan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK bahwa untuk kebutuhan *good corporate governance* pada setiap perusahaan, dewan komisaris independen wajib sekurang-kurangnya berjumlah 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris.

c. Komite Audit

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat rata-rata dari variabel independen Komite Audit yang dilambangkan dengan KOA adalah 3,23 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 6. Nilai minimum 3 rata rata perusahaan memiliki komite audit paling sedikit 3 orang dan nilai maksimum 6 berasal dari PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2020 perusahaan ini memiliki 6 orang komite audit. Hal ini berarti rata-rata nilai komite audit perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebesar 3,23. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan pertambangan telah sesuai dengan surat edaran dari PT Bursa Efek Indonesia SE 008/BEJ/12-2001 yang menyatakan bahwa jumlah komite audit sekurang-kurangnya 3 orang.

d. Kualitas Audit

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata dari variabel independen Kualitas Audit yang di lambangkan dengan KA adalah 0,60 dengan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Hal ini berarti rata-rata nilai kualitas audit perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebesar 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa 60% laporan keuangan perusahaan pertambangan dalam penelitian ini telah diaudit oleh KAP *The Big Four*.

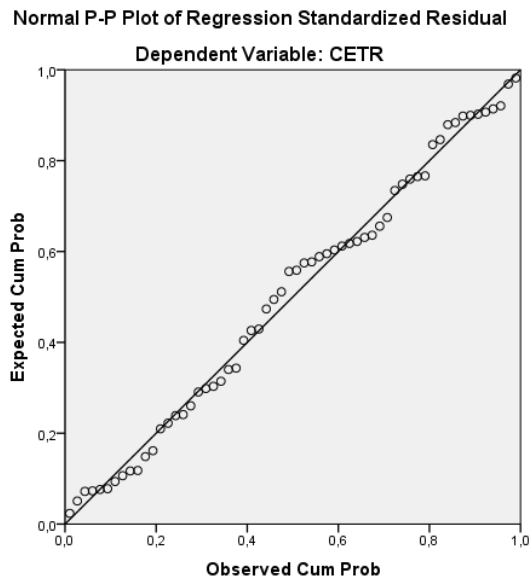
e. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Berdasarkan tabel 2 di atas nilai rata-rata dari variabel independen *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah 0,3221 dengan nilai minimum sebesar 0,1868 dan nilai maksimum sebesar 0,7363. Nilai minimum pada CSR berasal dari perusahaan PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) dan PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) yang sangat minim dalam pengungkapan CSR nya. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 perusahaan PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) hanya mengungkapkan 17 indikator CSR dari 91 indikator, dan perusahaan PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) pada tahun 2017 saja hanya 17 indikator dari 91 indikator CSR. Sedangkan nilai maksimum pada CSR berasal dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2020 yang sejauh ini memiliki pengungkapan CSR yang cukup bagus dengan mengungkapkan 67 indikator dari 91 indikator CSR. Nilai standar deviasi dari CSR adalah sebesar 0,1489.

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan grafik P-Plot di bawah dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini dapat terdistribusi secara normal. Agar lebih meyakinkan hasil uji normalitas ini, peneliti melakukan uji statistik terkait pengujian normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P-Plot
Sumber: Output SPSS versi 20

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil ringkasan uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui bahwa variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal ($0,886 > 0,05$). Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga pengujian dapat dilakukan.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	0,1964
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,059
	Negative	-0,075
Kolmogorov – Smirnov Z		0,583
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,886

Sumber: Output SPSS versi 20

2) Uji Multikolinieritas

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variable independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
INST	0,688	1,454
KO	0,825	1,212
KOA	0,756	1,323
KA	0,605	1,652
CSR	0,566	1,766

Sumber: Output SPSS versi 20

3) Uji Autokorelasi

Dapat dilihat dari tabel 5 nilai DW (Durbin Watson) sebesar 1,971 diantara -2 sampai +2, yang berarti tidak ada autokorelasi atau bebas autokorelasi.

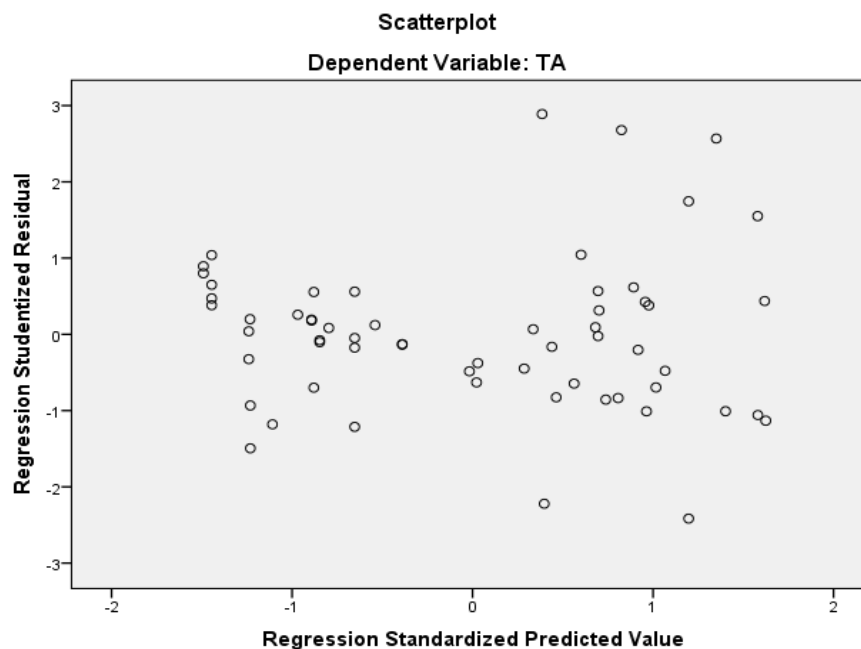
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin – Watson
1	0,476 ^a	0,227	0,155	0,1403	1,971

Sumber: Output SPSS versi 20

4) Uji Heterokedastisitas

Dari grafik *scatter plot* di bawah terlihat titik-titik menyebar secara acak dan berada di atas angka 0 maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, Agar lebih meyakinkan hasil uji heterokedastisitas ini, peneliti melakukan uji statistik terkait pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan *Spearman Rho*.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatter Plot

Sumber: Output SPSS versi 20

Dapat dilihat dari tabel 7 bahwa nilai signifikan / Sig (2-tailed) dari masing – masing variable seperti Kepemilikan Institusional 0,885; Dewan Komisaris 0,648; Komite Audit 0,200; Kualitas Audit 0,612 dan

Corporate Social Responsibility (CSR) 0,483 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah Heterokedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas *Spearman Rho*

		INST	KO	KOA	KA	CSR	<i>Unstandardized Residual</i>
INST	Corelation Coefficient	1,000	0,301	-0,003	0,297	-0,153	0,019
	Sig. (2- tailed)	-	0,019	0,981	0,021	0,244	0,885
	N	60	60	60	60	60	60
KO	Corelation Coefficient	0,301	1,000	-0,052	0,298	0,183	0,060
	Sig. (2- tailed)	0,019	-	0,695	0,021	0,162	0,648
	N	60	60	60	60	60	60
KOA	Corelation Coefficient	-0,003	-0,052	1,000	0,364	0,537	-0,168
	Sig. (2- tailed)	0,981	0,695	-	0,004	0,000	0,200
	N	60	60	60	60	60	60
KA	Corelation Coefficient	0,297	0,298	0,364	1,000	0,500	-0,067
	Sig. (2- tailed)	0,021	0,021	0,004	-	0,000	0,612
	N	60	60	60	60	60	60
CSR	Corelation Coefficient	-0,153	0,183	0,537	0,500	1,000	-0,092
	Sig. (2- tailed)	0,244	0,162	0,000	0,000	-	0,483
	N	60	60	60	60	60	60
<i>Unstandardized Residual</i>	Corelation Coefficient	0,019	0,060	-0,168	-0,067	-0,092	1,000
	Sig. (2- tailed)	0,885	0,648	0,200	0,612	0,483	-
	N	60	60	60	60	60	60

Sumber: Output SPSS versi 20

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 menggambarkan hasil analisis regresi linear berganda.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,873	0,214		4,087	0,000
INST	-0,238	0,133	-0,269	-1,509	0,050
KO	0,016	0,366	0,006	0,045	0,964
KOA	-0,101	0,052	-0,280	-1,955	0,05
KA	-0,023	0,070	-0,054	-0,336	0,738
CSR	0,108	0,238	0,075	0,454	0,652

Sumber: Output SPSS versi 20

Berdasarkan persamaan regresi yang telah dibuat, diperoleh variable :

- Konstanta (α) sebesar 0,873 berarti jika semua variabel independen sama dengan nol, maka *Tax Avoidance* bernilai 0,873.
- Kepemilikan Institusional (INST) memiliki nilai koefisien sebesar -0,238. Hal ini menunjukkan apabila nilai Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan, maka nilai CETR akan mengalami penurunan sebesar 0,238.
- Komite Audit (KOA) memiliki nilai koefisien sebesar -0,101. Hal ini menunjukkan apabila nilai Komite Audit mengalami kenaikan, maka nilai CETR akan mengalami penurunan sebesar 0,101.
- Kualitas Audit (KA) memiliki nilai koefisien sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan apabila nilai Kualitas Audit mengalami kenaikan, maka nilai CETR akan mengalami penurunan sebesar 0,023.
- Dewan Komisaris (KO) memiliki nilai koefisien sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan apabila nilai Dewan Komisaris mengalami kenaikan, maka nilai CETR akan mengalami Kenaikan sebesar 0,016.
- Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai koefisien sebesar 0,108. Hal ini menunjukkan apabila nilai *Corporate Social Responsibility* mengalami kenaikan, maka nilai CETR akan mengalami Kenaikan sebesar 0,108.

4. Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa besaran koefisien determinasi *Adjusted R²* adalah sebesar 0,155. Artinya, besarnya persentase variasi variabel dependen (CETR) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit, dan *Corporate Social*

Responsibility (CSR)) adalah sebesar 15%. Sisanya sebesar 85%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	0,476 ^a	0,227	0,155	0,1403

Sumber: Output SPSS versi 20

2) Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10 menggambarkan hasil uji parsial (uji T).

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
(Constant)	0,873	0,214	4,087	0,000	
INST	-0,238	0,133	-1,509	0,050	Berpengaruh Signifikan (H1 Diterima)
KO	0,016	0,366	0,045	0,964	Tidak Berpengaruh Signifikan (H2 Ditolak)
KOA	-0,101	0,052	-1,955	0,050	Berpengaruh Signifikan (H3 Diterima)
KA	-0,023	0,070	-0,336	0,738	Tidak Berpengaruh Signifikan (H4 Diolak)
CSR	0,108	0,238	0,454	0,652	Tidak Berpengaruh Signifikan (H5 Ditolak)

Sumber: Output SPSS versi 20

Berdasarkan tabel hasil uji T diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. Variabel X1 (Kepemilikan Institusional) memiliki nilai t -1,509 dengan signifikansi sebesar 0,050 atau = 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X1 (Kepemilikan Institusional) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini H1 diterima.
2. Variabel X2 (Dewan Komisaris) memiliki nilai t 0,045 signifikansi sebesar 0,964 atau > 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X2 (Dewan Komisaris) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini H2 ditolak.
3. Variabel X3 (Komite Audit) memiliki nilai t -1,955 dengan signifikansi sebesar 0,05 atau = 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X3 (Komite Audit) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini H3 diterima.
4. Variabel X4 (Kualitas Audit) memiliki nilai t -0,336 dengan signifikansi sebesar 0,738 atau > 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X4 (Kualitas Audit) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini H4 ditolak.
5. Variabel X5 (*Corporate Social Responsibility* / CSR) memiliki nilai t 0,454 dengan signifikansi sebesar 0,652 atau > 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X5 (*Corporate Social Responsibility* / CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini H5 ditolak.

3) Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat nilai hitung (F) sebesar 3,163 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kelima variable independen berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen (Tax Avoidance).

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	0,311	5	0,062	3,163	0,014 ^b
Residual	1,062	54	0,020		
Total	1,373	59			

Sumber: Output SPSS versi 20

Simpulan dan Saran
Simpulan

1. Kepemilikan Institusi Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance

Kesimpulan ini sejalan dengan teori agensi dimana teori ini menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dimana manajer ingin menghasilkan keuntungan sebanyak – banyaknya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin, kesimpulan ini didukung oleh penelitian (Dina & Syam, 2016).

2. Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan kesimpulan diatas perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen yang tinggi, cenderung melakukan pengawasan kinerja manajemen untuk menghindari penghindaran pajak, sesuai dengan teori keagenan. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen (manajemen) dengan pemilik (prinsipal) sehingga bisa memunculkan konflik diantara keduanya. Dengan adanya proporsi Dewan komisaris yang tinggi dalam sebuah perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang semakin optimal terhadap kinerja manajemen dimana Dewan Komisaris yang menjadi principal melakukan pengawasan kinerja terhadap manajemen yang menjadi agen, kesimpulan ini didukung oleh penelitian (Sri Mulyani, 2018).

3. Komite Audit Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance

Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan Salah satu fungsi komite audit adalah memastikan laporan keuangan dan pelaksanaan audit terlaksana dengan baik, akan tetapi apabila dilihat dari latar belakang keahlian komite audit di perusahaan, yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, diperlukan anggota komite audit yang mempunyai latar belakang keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Tetapi hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang berlawanan. Disatu sisi, dengan latar belakang keahliannya dibidang akuntansi dan keuangan, komite audit dapat mencegah terjadinya praktek – praktek dan kebijakan yang merugikan perusahaan, tetapi disisi lain, dengan latar belakang keahliannya tersebut, komite audit mengetahui celah yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penghindaran pajak perusahaan dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu Negara. Sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan, kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Aditya, 2016).

4. Kualitas Audit Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan kesimpulan di atas kualitas audit perusahaan pertambangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* maupun *non Big Four* tidak berpengaruh terhadap perusahaan itu melakukan penghindaran pajak, dikarenakan semua kantor akuntan public sudah patuh taat kepada regulasi yang ada. perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* maupun Kantor Akuntan Publik *non big four* dalam melakukan audit laporan keuangan. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik baik *big four* maupun *non big four* memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Nugraheni, 2018).

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan kesimpulan diatas semakin tinggi atau rendahnya pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak /*Tax Avoidance*. karena tujuan pengungkapan CSR sendiri adalah untuk membuat citra perusahaan semakin baik dimata masyarakat karena kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, hal ini sesuai dengan teori yang ada di penelitian ini yaitu teori legitimasi. Berdasarkan teori legitimasi ini, perusahaan akan berusaha melakukan berbagai tindakan untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat membangun keyakinan masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi dengan baik dan telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Lanis dan Richardson, 2011).

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka guna keperluan penelitian selanjutnya, berikut beberapa saran yang mungkin bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel penelitian lain, seperti koneksi politik yang dimiliki perusahaan dan sebagainya.
2. Disarankan untuk menambah jangka waktu atau tahun penelitian untuk hasil yang lebih akurat.
3. Disarankan untuk menggunakan proksi *tax avoidance* yang lain, seperti *effective tax rate* (ETR) atau *book tax gap*.

Disarankan untuk menguji sektor dan sub-sektor perusahaan lain untuk sampel yang lebih beragam dan hasil yang saling melengkapi.

Referensi

Annisa, Nuralifimida Ayu, dan Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance* . Jurnal Akuntansi & Auditing, 8 No.2, 95-189.

Arfenta, Satria Nugraheni, D. P. (Agustus 2018). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *e-Proceeding of Management* : Vol.5, No.2 , 2227

DDTCNews.2019. *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?*.https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=867 . Ditelusuri 29 September 2020

Dina Marfirah, Fazli Syam BZ, 2016, *Pengaruh Corporate Governance dan leverage terhadap tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

- Jensen, M., dan W.H. Meckling. 1976. *Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure*. Journal Of Financial Economics 3. Hal. 305- 360.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556
- Mulyani, Sri, Anita Wijayantidan Endang Masitoh. 2018. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340 ISSN 2548-4346
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Pohan, C. An. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Bumi Aksara.
- Roman Lanis, G. R. (2021). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *J. Account. Public Policy* , 31.
- Resmi, Siti. 2017 . *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat
- Zulaikha, Ahmad Reza Dwi Permana. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011-2014)*. Diponegoro Journal Of Accounting: ISSN (Online):2337-380